

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini menganalisis, mengkaji, serta menilai hambatan dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian melalui program Perhutanan sosial yang menjadi resolusi konflik dalam permasalahan di Sektor kehutanan yang mewujudkan kelesatan hutan dan kesejahteraan Masyarakat disekitar Hutan. Melihat hal ini dalam penelitian ini membahas (1). Bagaimana Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kerja sama antara PT. Rimba Hutani Mas dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat? (2). Bagaimana Upaya penyelesaian dari perjanjian yang sudah dilaksanakan para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT. Rimba Hutani Mas dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat? Penelitian ini mengambil metode penelitian Empiris yang melihat dari fakta lapangan apakah sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara atau tidak, yang pengumpulan data nya dilakukan dengan pedoman wawancara serta studi dokumen. Dalam penelitian ini data atau bahan informasi dianalisis secara kualitatif. Dapat di simpulkan dalam pelaksanaan Perjanjian kerja sama antara PT. Rimba Hutani Mas (RHM) dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan dalam skema Kemitraan Kehutanan, bahwa perjanjian tersebut secara normatif telah memenuhi ketentuan hukum perjanjian Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan, terjadi ketidaksesuaian PT. Rimba Hutani Mas sebagai pihak pertama, tidak secara optimal melaksanakan sebagian besar kewajiban yang telah disepakati. Hal ini menghambat pihak kedua dalam melaksanakan peran sebagaimana mestinya, dan menyebabkan ketimpangan pelaksanaan hak dan kewajiban. Upaya penyelesaian melalui mediasi dan somasi telah dilakukan oleh pihak kedua, namun tidak membuahkan hasil.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama, Perhutanan Sosial.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze, study, and assess the obstacles and constraints that arise in the implementation of the agreement through the social forestry program which becomes the resolution of conflicts in problems in the forestry sector that realizes forest conservation and the welfare of the community around the Forest. Looking at this in this study discusses (1). What are the Rights and Obligations of the parties in the Cooperation Agreement between PT. Rimba Hutani Mas with Forest Farmers Group (KTH) Bernai Harapan Lubuk Bernai Village Batang Asam District West Tanjung Jabung Regency? (2). How is the effort to complete the agreement that has been implemented by the parties in the Cooperation Agreement between PT. Rimba Hutani Mas with Forest Farmers Group (KTH) Bernai Harapan Lubuk Bernai Village Batang Asam District West Tanjung Jabung Regency? This research takes an empirical research method that looks at field facts whether it is in accordance with article 1338 of the Civil Code or not, which data collection is carried out with interview guidelines and document studies. In this study, data or information materials are analyzed qualitatively. It can be concluded in the implementation of the Cooperation Agreement between PT. Rimba Hutani Mas (RHM) with Bernai Harapan Hutan Farmer Group (KTH) in the Forestry Partnership scheme, that the agreement normatively has met the legal provisions of the agreement. However, in its implementation in the field, there is a non-compliance of PT. Rimba Hutani Mas as the first party, did not optimally carry out most of the agreed obligations. This hinders the second party in carrying out its role as it should, and causes inequality in the implementation of rights and obligations. Settlement efforts through mediation and summons have been carried out by the second party, but have not yielded results.

Keywords: *Cooperation Agreement, Social Forestry.*